

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh yang tidak berasal dari pemerintah. Sedangkan pemerintah wajib menghormati otonomi asli yang terdapat pada desa tersebut. Selaku kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berlandaskan hak istimewa, desa bisa melaksanakan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, mempunyai kekayaan, harta benda serta bisa dituntut dan menuntut di depan pengadilan (Widjaja, 2003).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar yang kuat untuk desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana posisi desa bukan sebagai sebagai level administrasi atau bawahan daerah namun sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi (Widjaja, 2003).

Demi meningkatkan kesentosaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah menyediakan beberapa dana untuk membantu masyarakat desa/kelurahan, dengan tujuan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dana bantuan tersebut dinamakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Royat, 2008).

Di dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No : 25/KEP, MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, diuraikan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri dikoordinasikan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan anggota masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Melalui prosedur pembangunan partisipatif, kedarasan kritis dan kemandirian masyarakat, yang paling utama masyarakat miskin bisa ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan (Hidayatina & Surtiani, 2018).

Salah satu kegiatan utama PNPM Mandiri adalah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ke setiap kecamatan. Kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini dirancang untuk memberikan pembangunan infrastruktur dan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Alokasi dana untuk rencana SPP sampai dengan 25% dari dana BLM. Tidak ada batasan alokasi maksimum untuk setiap desa, tetapi hasil tinjauan kualifikasi kelompok harus dipertimbangkan. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan untuk program SPP digunakan sebagai bantuan modal kerja bagi pelaku usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas ekonominya. Pada saat yang sama, prioritas diberikan untuk mengalokasikan pinjaman atau bantuan modal kerja kepada masyarakat miskin

yang memiliki usaha produktif. (Nihaya, 2015). Adapun kondisi sebaran pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sijunjung yang dilihat berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kondisi Sebaran Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2018 – 2019

Kecamatan	Alokasi Pinjaman (Rp)		Jumlah Perguliran Pinjaman (Rp)		Jumlah Kelompok (Unit)		Jumlah Pemanfaat (Orang)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kupitan	10.204.500.000	10.981.000.000	9.396.500.000	10.173.000.000	65	71	512	546
Kamang Baru	3.783.863.000	4.085.438.000	5.502.500.000	5.686.000.000	57	58	818	789
Tanjung Gadang	32.935.700.000	34.721.000.000	3.772.428.000	3.432.000.000	93	98	791	991
Sumpur Kudus	5.334.000.000	5.604.500.000	4.263.850.000	4.442.000.000	56	63	843	853
Lubuk Tarok	2.876.885.500	3.099.473.500	3.251.000.000	2.908.500.000	119	127	2.613	2.787
Koto VII	43.649.870.000	49.043.587.000	5.114.038.500	5.384.171.100	108	113	1.453	1.482
IV Nagari	11.600.090.000	12.066.413.000	1.840.982.000	1.808.026.000	34	31	330	333

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kab. Sijunjung, 2018 - 2019

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, kecuali di Kecamatan Kamang Baru. Jumlah pemanfaat di Kecamatan Kamang Baru mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 berjumlah 818 orang sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 789 orang.

Adapun kondisi sebaran pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung yang dilihat berdasarkan Desanya dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kondisi Sebaran Pinjaman Dana Bergilir PNPB Mandiri Perdesaan Menurut Desa di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2018 – 2019

Desa	Alokasi Pinjaman (Rp)		Jumlah Perguliran Pinjaman (Rp)		Jumlah Kelompok (Unit)		Jumlah Pemanfaat (Orang)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Lubuk Tarantang	300.001.000	262.499.000	400.000.000	350.000.000	1	1	55	74
Sungai Lansek	344.515.000	375.665.000	390.000.000	426.000.000	4	3	53	44
Muaro Takung	444.995.000	639.764.000	642.000.000	905.000.000	7	14	80	148
Siaua	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunpar	486.293.000	514.939.000	963.000.000	1.022.000.000	9	15	133	172
Kamang	1.627.958.000	1.193.893.000	2.534.500.000	1.742.000.000	27	12	399	189
Maloro	530.991.000	701.134.000	418.000.000	795.000.000	6	8	68	111
Aie Amo	3.446.000	3.206.000	-	-	-	-	-	-
Sungai Betung	-	-	-	-	-	-	-	-
Padang Tarok	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Kalias	45.664.000	146.731.000	155.000.000	445.000.000	3	5	30	51

Sumber : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kamang Baru, 2018 - 2019

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir PNPB Mandiri Perdesaan menurut Desa di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, kecuali pada dua desa yang salah satunya yaitu di Desa Sungai Lansek. Jumlah pemanfaat di Desa Sungai Lansek mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 berjumlah 53 orang sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 44 orang. Dan pada tahun 2019 Desa Sungai Lansek merupakan desa yang jumlah pemanfaatnya paling sedikit dibandingkan desa lainnya yang ada di Kecamatan Kamang Baru.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Penerima di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam”*

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana karakteristik penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh peminjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan terhadap peningkatan pendapatan usaha penerima di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat ?
- 1.2.3 Bagaimana proses peminjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dilihat dari perspektif Ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui karakteristik penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh peminjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan terhadap peningkatan pendapatan usaha penerima di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

1.3.3 Untuk mengetahui proses peminjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dilihat dari perspektif Ekonomi Islam

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi, khususnya Ekonomi Islam tentang penerapan dan pengelolaan pinjaman dana.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini akan dapat memberikan informasi tentang perspektif Ekonomi Islam terhadap peminjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan baik instansi terkait dan pemerintah daerah, PNPM, dan sebagai acuan bagi penelitian lanjutan.